



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 06 Mei 2026

Halaman: 2



**EVLUASIS** Susana salah satu TK KB dan tempat penitipan anak di kawasan Kemantren Umbulharjo, Joga, kemarin (5/5). Pengprov DJI menjabarkan bupat dan wali kala melaporkan progres penitipan daycare maksimal 15 hari setelah lulus guru mengantisipasi praktik daycare ilegal.

## Hanya 24 Penilik Awasi Ribuan PAUD Nonformal

**Pemprov Wadul ke DPR RI, Kekurangan SDM Hambat Pengawasan Daycare**

**YOGIA** - Pemprov DJI menjabarkan minimnya penilik PAUD nonformal ke DPR RI karena jumlahnya jauh dari cukup, bahkan di Kota Joga kini kosong setelah satu satunya pegawai telah pensiun. Kondisi ini dinilai menghambat pengawasan daycare pra-akademik karena di Liris Areha Joga.

Kepala Dinas Pembudayaan, Pengembangan, Perencanaan Anak dan Pengendalian Pendidikan (DPAAP) DJI Ertina Hilaga-Semanti mengatakan, pertemuan dengan perwakilan DPR RI dilakukan di Mabes Polda DIJ, Senin (4/5). Ada beberapa poin yang disampaikan dalam audiensi antara Wakil Ketua DPR RI, Ketua Komisi VIII DPR RI, Poldasolaresa, Kementerian PPPA, KPM, DPAAP DIJ, dan DPAAPKB Kota Joga tersebut.

Pertama, terkait proses hukum terhadap para pelaku yang harus membuat eksekusi dan memberi keadilan bagi korban. Sebab, kasus tersebut berdampak panjang baik pada maupun fisik terhadap tumbuh kembang anak-anak yang menjadi korban serta pada orangtua yang mengalami trauma dan merasa bersalah. Kedua, mewujudkan semua pihak di DIJ baik pemerintah maupun lembaga terkait, memperbaiki lagi sistem, regulasi, dan mekanisme pengawasan sehingga tidak terulang kembali.

Terkait kemari waktu pertemuan di Poldasolaresa, penilik PAUD nonformal ini kian terancam sangat kurang, "gantinya saat dikonfirmasi, kemarin (5/4).

Menurutnya, jumlah penilik PAUD tak sebanding dengan banyaknya instansi PAUD nonformal yang jumlahnya mencapai ribuan di DIJ. Padahal, peran penilik PAUD menjadi aspek yang penting sebagai salah satu pihak yang bertugas untuk memantau dan juga mengawasi operasional di setiap PAUD.

"Bahkan kota pun per 1 Mei ini nggak punya penilik untuk PAUD nonformal, karena hanya satu itu pun sudah pensiun," sandainya.

Seingatnya, penilik PAUD



**PENANGANAN KORBAN KASUS LITTLE RAINBOW**  
 Paket Joga melalui DPAAPKB harus melibatkan pendampingan masyarakat.

## 31 Penitipan Layak tapi Belum Berizin

**MEMINDAKI NHTI** Instruktur Gabungan (Inggris) DJI penitipan daycare, puluhan daycare belum berizin meski dinilai layak secara fasilitas dan operasional. Penilik Joga kini mendampingi legalisasi mapel penitipan paksa, sambil tetap memverifikasi standar keamanan dan melindungi rintang anak korban kasus daycare.

Kepala Dinas Pembudayaan, Pengembangan, Perencanaan Anak dan Pengendalian Pendidikan dan Kesejahteraan (DPAAPKB) Kota Joga Remaningras mengemukakan, ada 31 daycare di wilayahnya belum berizin. Sementara 37 lain-lain sudah berizin.

"Sehingga secara infrastruktur sebenarnya banyak yang layak, namun kami doongunkan segera meliberalisasi operasionalnya," katanya di Balai Kota Joga, kemarin (5/5).

Era seapan akhirnya itu meliberalkan, tempat penitipan anak (TPA) yang belum berizin utamanya harus perbaikan pengembangan layanan dan layanan rintang anak korban kasus daycare.

Kepala Dinas Pembudayaan, Pengembangan, Perencanaan Anak dan Pengendalian Pendidikan dan Kesejahteraan (DPAAPKB) Kota Joga Remaningras mengemukakan, ada 31 daycare di wilayahnya belum berizin. Sementara 37 lain-lain sudah berizin.

"Sehingga secara infrastruktur sebenarnya banyak

### STANDAR KEAMANAN SESUAI HEDIG DJI

- **Basin Pengasah & Anak**: Canggihnya, untuk bayi usia 0-3 tahun, lalu pengasah, mekanis merangsang tiga anak.
- **Fasilitas CCTV**: Kamera pemantauan wajib terpasang dan dapat diakses oleh orang tua untuk memantau aktifitas anak.
- **Kapasitas Berapapun**: Wajib memiliki sertifikat yang baik dan rinci, berizin yang cukup.
- **Kelengkapan Operasional**: Orang tua harus diperlihatkan melihat aktifitas anak secara langsung, termasuk masuk ke dalam ruangan saat beroperasi.



132 anak mendapatkan pendampingan jumlah lain karena berizin dari 150 orang tua merupakan pendampingan paksa.

Melibatkan dokter anak, psikolog, terapis, dan guru, hingga 20 akibat anak mengalami trauma. Saat mapel anak yang diumumkan pada hari Senin.

ada penitipan paksa bagi daycare ilegal. Lantas saat ini proses verifikasi sudah berjalan. Namun jika ditemukan ada fasilitas yang tidak memenuhi standar maka ada sanksi tegas kepada pengelola.

Terkait, Kepala DPAAPKB Kota Joga Budi Suno-sa Astri memantapkan daycare ilegal tak dituntut karena pertimbangan anak dan orangtua. DPAAPKB jika tetap dituntut justru timbul kehilangan untuk mencari daycare pengganti.

Budi memastikan daycare yang belum berizin sebenarnya sudah layak dari segi prasarana maupun pengasah. Hanya karena dari segi legalitas operasionalnya saja. (Irena Wita/R)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005